



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI UPTD SDN BUDAYASARI DESA CIKAUM TIMUR KECAMATAN CIKAUM KABUPATEN SUBANG

Takya Marell Andena¹

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
takyamarell03@gmail.com

Tepi Peirisa²

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
tepipey@gmail.com

A Moeslihat Komara³

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
amoeskomara@gmail.com

Abstrak

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik. Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah bentuk kartu identitas dari bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). SDN Budayasari Desa Cikaum Timur Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang merupakan salah satu sekolah dasar penerima bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Subang. Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta mengurangi kesenjangan sosial dalam hal akses pendidikan bagi siswa-siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya di SDN Budayasari.

Di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari Desa Cikaum Timur Kabupaten Subang dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari Desa Cikaum Timur Kabupaten Subang, peneliti memilih teori Marilee S. Grindle yang meliputi Isi Kebijakan dan juga Konteks Kebijakan. Yang mana apabila dalam implementasinya merujuk pada teori ini, maka program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian, masalah utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari. Karena dalam temuan di lapangan masih dijumpai beberapa permasalahan-permasalahan seputar implementasi. Dengan kata lain adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada. Seperti penerima bantuan yang tidak tepat sasaran serta kurang tegasnya para petugas terkait pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan, Sekolah Dasar



Abstract

The Smart Indonesia Program is assistance in the form of cash, expanded access and learning opportunities from the government given to students from poor families to help with the students' personal educational costs. Smart Indonesia Card is a form of identity card provided by the Smart Indonesia Program. Budayasari state elementary school, East Cikaum Village, Cikaum District, Subang Regency is one of the elementary schools receiving assistance from the Smart Indonesia Card program in Subang Regency. This Smart Indonesia Card is expected to be able to improve the accessibility and quality of education as well as reduce social disparities in terms of access to education for students from underprivileged families, especially at Budayasari state elementary school.

This research aims to find out how the implementation of the Smart Indonesia Card Program Policy at Budayasari state elementary school, East Cikaum Village, Subang Regency achieves goals in accordance with the vision and mission. To analyze the implementation of the Smart Indonesia Card Program Policy at Budayasari state elementary school, East Cikaum Village, Subang Regency, researchers chose Marilee S. Grindle's theory which includes Policy Content and Policy Context. If the implementation refers to this theory, the Smart Indonesia Card program at Budayasari state elementary school will be successful.

Based on the research results, the main problem in this research is that the implementation of the Smart Indonesia Card program policy at Budayasari state elementary school has not been optimal. Because in the findings in the field there are still several problems regarding implementation. In other words, there are gaps or inconsistencies with existing regulations. Such as aid recipients who were not on target and officers being less assertive regarding the implementation of the Smart Indonesia Card program.

Keywords: Policy Implementation, Education, Elementary School

Pendahuluan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan ini merupakan serangkaian upaya yang efektif yang ditujukan untuk mencapai kemajuan bangsa yang akan terwujud secara nyata dengan upaya menciptakan ketahanan nasional. Pentingnya sebuah pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, karena pendidikan merupakan kunci dalam melatih sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan akan terus berubah dan berkembang secara bertahap, sehingga menjadikan pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 7 pada Tahun 2014, bahwasanya memandatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempersiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada para siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan kelanjutan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang meliputi siswa dari jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan siswa/warga Indonesia yang menempuh pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).



Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menangani masalah biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin, yang diwujudkan dalam bentuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Di dalam pelaksanaannya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP), yang termasuk ke dalam program bantuan sosial dari pemerintah untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. Program Indonesia Pintar (PIP) sendiri ditujukan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Program Indonesia Pintar (PIP) dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin, maupun prioritas, untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. Program Indonesia Pintar (PIP) juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Tabel 1. Rincian Penyaluran Dana KIP Kecamatan Cikaum

Jenjang		SK	Aktivasi	Persentase
SD	Siswa	75	62	82,66%
SD	RP	29.250.000	24.750.000	84,62%
SMP	Siswa	55	21	38,18%
SMP	RP	39.375.000	13.875.000	35,24%
SMA	Siswa	12	0	0%
SMA	RP	12.000.000	0	0%
SMK	Siswa	137	55	40,15%
SMK	RP	135.000.000	53.000.000	39,26%
TOTAL	Siswa	276	138	50,00%
TOTAL	RP	215.625.000	91.625.000	42.492.753.623.188

Sumber : Program Indonesia Pintar Penyaluran

Namun, dalam temuan di lapangan masih dijumpai beberapa permasalahan-permasalahan seputar implementasi atau biasa disebut dengan implementation gap. Kesenjangan Implementasi (implementation gap) adalah keadaan di mana setiap proses kebijakan akan selalu mempunyai kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya dicapai, akibat dari hasil atau efektifitas implementasi kebijakan. Seharusnya, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu berjalan menurut regulasi Permendikbud No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Yang menyatakan tentang



perluasan akses, bantuan yang berupa uang tunai, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Dalam kenyataan atau fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi, tidak sesuai seperti yang seharusnya. Misalnya dalam hal penyalahgunaan pemanfaatan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang mana dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan dalam pembiayaan pendidikan siswa penerima bantuan tetapi pada kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadi. Keterlambatan dalam pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena kurangnya kerjasama dari pihak-pihak terkait. Baik itu dari koordinator program Kartu Indonesia Pintar (KIP) SDN Budayasari maupun orang tua siswa penerima program tersebut. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan indikator-indikator yang ada dalam teori Marilee S. Grindle mengenai kepatuhan dan daya tanggap, serta mengenai jenis manfaat yang dihasilkan. Maka apabila nantinya implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ada di SDN Budayasari ini telah sesuai dengan indikator-indikator yang ada pada teori tersebut diharapkan dapat membuat program ini menjadi lebih efektif dan dapat mensejahterakan para siswa penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kerangka Teori

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3), mengemukakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah Undang-Undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya putusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.

Van Horn (Wahab, 1997) mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu/pejabat atau kelompok/swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan di dalam kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2005) membuat kategorisasi bahwa implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target. Implementasi juga sebagai upaya melakukan, mencapai, memenuhi, dan menghasilkan.

Dengan kata lain, implementasi kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Implementasi suatu kebijakan ini berkaitan erat dengan faktor manusia, dengan berbagai latar belakang, aspek sosial, budaya politik dan sebagainya.

Anderson (1978:92) menyatakan bahwa mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi
2. Hakikat proses administrasi
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan
4. Efek atau dampak dari implementasi

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan putusan yang diinginkan. Sedangkan Abidin (2004:191) mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu :

1. Faktor internal yang meliputi (a) kebijakan yang akan dilaksanakan, dan (b) faktor-faktor pendukung,
2. Faktor eksternal yang meliputi (a) kondisi lingkungan, dan (b) pihak-pihak terkait.

Menurut Marilee S. Grindle (Wibawa, 1990:127) dikenal dengan nama "*Implementation as A Political and Administrative Process*". Mengemukakan bahwa teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a. Impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Dalam teorinya itu Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuantujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Isi kebijakan menurut Grindle mencakup :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Hal yang berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.



2. Jenis manfaat yang dihasilkan
Upaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
4. Kedudukan pembuat kebijakan
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan.
5. Siapa pelaksana program
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan sudah kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
6. Sumber daya yang dikerahkan
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan dan posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakan.

Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi.

Yang dimaksudkan oleh Grindle dengan konteks kebijakan adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana
Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksananya, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai sumber data primer. Metode ini berfokus pada memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.

Hasil dan Pembahasan

SDN Budayasari merupakan unit pelaksana pada bidang pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Subang. SDN Budayasari mempunyai tugas untuk melaksanakan roda pemerintahan dalam bidang pendidikan dan pelayanan publik pada tingkat kabupaten. SDN Budayasari ini merupakan salah satu sekolah dasar di Kabupaten Subang. Lebih tepatnya SDN Budayasari ini beralamat di Jl. Raya Cikaum Hilir, RT.05/RW.02, Cikaum Timur, Kec. Cikaum, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41253. SDN Budayasari termasuk ke dalam sekolah dasar di Kabupaten Subang yang sudah terakreditasi A. SDN Budayasari memiliki 1 Kepala Sekolah, 1 Operator Sekolah, 6 Guru Kelas, 4 Guru Mata Pelajaran. SDN Budayasari termasuk ke dalam sekolah dasar kelompok "adiwiyata", sekolah terletak di lingkungan yang tenang, terlindung dari kebisingan lalu lintas. Oleh karena itu, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman menjadi keunggulan SDN Budayasari. Selain itu, lingkungan asri dan hijau di sekitar sekolah menjamin lingkungan belajar yang nyaman bagi anak-anak. SDN Budayasari di dirikan pada tahun 1975 di bangun dengan bantuan dana pemerintah. Sejak di dirikannya SDN Budayasari sudah melewati beberapa periode pergantian masa kepala sekolah.

Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai Pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin, yang termasuk adalah sebagai berikut :

1. Pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
2. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Yatim piatu
4. Penyandang disabilitas
5. Korban bencana alam atau musibah

SDN Budayasari merupakan salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Subang, yang mana lebih tepatnya terletak di Desa Cikaum Timur Kecamatan



Cikaum Kabupaten Subang. SDN Budayasari ini merupakan salah satu sekolah penerima bantuan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dibuat oleh pemerintah. Setiap tahunnya anak-anak/siswa/I penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar nominal yang telah ditentukan oleh pemerintah yang disalurkan melalui bank mitra. Bantuan dana dari Program Kartu Indonesia Pintar ini diberikan bukan hanya untuk sekedar memberikan dana kepada masyarakat, akan tetapi dana bantuan tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan/kepentingan anak dalam mengenyam Pendidikan.

Pada setiap sekolah penerima bantuan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini biasanya memiliki penanggung jawab tersendiri. Di SDN Budayasari pun, tentunya memiliki penanggung jawabnya tersendiri. Yang diwakili oleh Kepala Sekolah SDN Budayasari yaitu bapak Sahlim, S.Pd.SD sebagai penanggung jawab utama, dan juga ibu Yeni Ratnasari, S.Pd sebagai koordinator Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari yang bertanggung jawab pada proses pengelolaan dan juga pengorganisasiannya. Yang mana pada pengorganisasian pemilihan koordinator program ini dilakukan secara konvensional, yaitu dipilih atau ditunjuk langsung oleh kepala sekolah di sekolah tersebut.

Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari

Peneliti memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian di lapangan. Indikator pertama yang digunakan penulis untuk mengukur adalah teori dari Marilee S. Grindle (Wibawa, 1994:127) dalam bukunya Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Isi Kebijakan

Untuk dapat mengukur suatu keberhasilan implementasi kebijakan program dapat dilihat dari isi kebijakannya terhadap program itu sendiri. Menurut Marilee S. Grindle (Wibawa, 1994:127) faktor isi kebijakan yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang mempengaruhinya, jenis manfaat yang diperoleh, derajat perubahan yang ingin dicapai, kedudukan pembuat kebijakan, para pelaksana program, sumber daya yang digunakan ini dianggap sebagai faktor yang sangat penting, karena sebagai tombak dari adanya program tersebut.

Menurut Marilee S. Grindle (Wibawa, 1990:127) Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Isi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana UPTD SDN Budayasari melaksanakan dan memanfaatkan pemanfaatan sumber-sumber



daya yang ada, serta adil dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga menghasilkan perubahan yang ingin dicapai secara optimal. Untuk menjawab isi kebijakan tersebut maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian dalam hal ini adalah Kepala Sekolah UPTD SDN Budayasari, sebagai penanggung jawab program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Sekolah UPTD SDN Budayasari bahwa implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah UPTD SDN Budayasari yang menyatakan bahwa dalam pemanfaatannya Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak merata. Masih banyak peserta didik yang seharusnya mendapatkan bantuan program tersebut tetapi pada kenyataannya tidak, atau sebaliknya peserta didik yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan program tetapi mendapatkan. Hal ini kerap terjadi karena kesalahan sistem oleh Dapodik atau DTKS. Jika dikaitkan dengan konsep teori Menurut Marilee S. Grindle (Wibawa, 1994:127) yang menyatakan suatu kebijakan akan efektif manakala isi dari kebijakan tersebut dijalankan secara utuh juga menyeluruh. Apabila dikaitkan dengan pernyataan Kepala Sekolah UPTD SDN Budayasari bahwa pelaksanaan pemanfaatan program belum berjalan sepenuhnya. Dilihat dari aspek penting dalam isi kebijakan adalah tipe manfaat dan derajat perubahan yang ingin dicapai. Hal ini dapat mengakibatkan rencana implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak tersampaikan kepada sasaran dengan dapat dikatakan bahwa isi kebijakan belum dapat terimplementasikan.

Lalu berdasarkan pernyataan dari Koordinator program Kartu Indonesia Pintar (KIP), bahwa program tersebut dalam hal pengambilan keputusan akan kepentingan terhadap implementasi melalui sosialisasi belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan koordinator program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menyatakan bahwa belum optimalnya penyampaian sosialisasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) karena masih adanya pihak-pihak yang egois, merasa perlu dan ingin mendapatkan bantuan tersebut. Maka segala bentuk pemanfaatan dalam program ini belum sepenuhnya terlaksana. Jika dikaitkan dengan teori Isi Kebijakan Menurut Marilee S. Grindle (Wibawa, 1994:127) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan dan adil dalam pengambilan keputusannya. Dengan demikian dapat dikatakan isi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum terlaksana.

Sedangkan berdasarkan pernyataan dari penerima bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), informasi yang didapatkan terkait pengambilan dana bantuan kurang cepat seringkali informasi tersebar mendadak. Jika dikaitkan dengan teori Isi Kebijakan Menurut Marilee S. Grindle (Wibawa, 1994:127) yang menyatakan bahwa aspek sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Implementasi akan terjadi apabila pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel mengetahui apa yang seharusnya



dikerjakan. Dengan demikian sumber daya yang digunakan serta pelaksana program tidak berjalan dengan efektif.

Dari ketiga pernyataan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Isi Kebijakan pada kegiatan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum efektif terlihat dari pemahaman segelintir orang tua siswa di sekolah tersebut yang berpikir harus mendapatkan bantuan tersebut walaupun nyatanya mereka masuk ke dalam kategori mampu, setelah sosialisasi dilakukan. Jika melihat konsep teori Marilee S. Grindle (Wibawa, 1994:127) bahwa suatu kebijakan akan efektif apabila para pelaksana memahami makna dan tujuan dari aspek-aspek yang ada dalam isi kebijakan tersebut.

Konteks Kebijakan

Untuk dapat mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan program dapat dilihat dari bentuk konteks kebijakan terkait program itu sendiri. Menurut Marilee S. Grindle (Wibawa, 1994:127) faktor konteks kebijakan yang terdiri atas kepentingan kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap ini sangatlah penting, karena sebagai salah satu alat ukur dalam suatu keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan regulasi, tanpa adanya yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila respon dan strategi yang dilakukan oleh aktor atau lembaga yang terlibat diperhitungkan secara matang dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Menurut pendapat Marilee S. Grindle (Wibawa, 1994:127) bahwa Konteks Kebijakan terdiri dari kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Konteks kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana UPTD SDN Budayasari menjalankan implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merujuk pada isi dari konteks kebijakan tersebut. Untuk menjawab isi konteks kebijakan tersebut maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian dalam hal ini adalah Kepala Sekolah UPTD SDN Budayasari, sebagai penanggung jawab program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sekolah tersebut.

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara dari Kepala Sekolah UPTD SDN Budayasari bahwa implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa masalah kematangan strategi dalam kepentingan aktor yang terlibat secara optimal. Dilihat dari keseimbangan kepala sekolah, yang mana seharusnya mengetahui bahwa bijak dan adil dalam program ini sangat diperlukan. Hal ini jika dikaitkan dengan dengan konsep teori Marilee S. Grindle (Wibawa, 1994:127) yang menyatakan efektif apabila isi kebijakan dijalankan dengan sepenuhnya. Jika dikaitkan dengan pernyataan Kepala Sekolah UPTD SDN Budayasari bahwa pelaksanaan implementasi belum berjalan dengan sepenuhnya tingkat kepatuhan pelaksanaan program harus sesuai regulasi yang ada serta kematangan strategi harus diperhitungkan. Hal ini dapat mengakibatkan



rencana implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak berjalan sesuai dengan semestinya.

Sedangkan, berdasarkan pernyataan Koordinator program Kartu Indonesia Pintar (KIP) UPTD SDN Budayasari, bahwa implementasi penerimaan bantuan program ini belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan koordinator program bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik sesuai dengan kepentingan strategi lembaga dan aktor yang terlibat, jika dikaitkan dengan teori Konteks Kebijakan menurut Marilee S. Grindle (Wibawa, 1994:127). Dengan demikian dapat dikatakan faktor komunikasi belum terimplementasikan.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Konteks Kebijakan pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum efektif terlihat dari hasil pertimbangan ajuan bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh orang tua siswa kategori mampu tetap mereka dapatkan oleh pihak UPTD SDN Budayasari Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang. Jika disesuaikan dengan teori Marilee S. Grindle (Wibawa, 1994:127) penulis menyimpulkan bahwa dalam indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, serta karakteristik lembaga dan penguasa belum efektif. Namun untuk indikator pada tingkat kepatuhan dan daya tanggap sudah cukup berjalan efektif.

Proses Penyusunan dan Pengorganisasian Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari

Pada prosesnya, penyusunan dan pengorganisasian Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini harus melalui beberapa tahap dan juga syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan sesuai regulasi yang ada. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan calon penerima dalam pendaftaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) :

1. Menyiapkan Berkas yang Diperlukan
Adapun berkas-berkas yang perlu dipersiapkan sebelum membuat KIP, adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Keluarga (KK)
 - b. Akta Kelahiran
 - c. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau SKTM apabila tidak memiliki KKS
 - d. Rapor hasil belajar siswa
 - e. Surat pemberitahuan penerima BSM dari Kepala Sekolah
2. Melakukan Proses Pendaftaran
Siswa dapat mendaftar dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) orang tuanya ke Lembaga Pendidikan terdekat. Namun, jika tidak memiliki KKS, orang tua dapat meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW dan Kelurahan/Desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran.
3. Pengajuan Calon Penerima
Setelah itu, sekolah akan mencatat data siswa calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk dikirim atau diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.



4. Pendaftaran Dapodik dan Seleksi

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirim data /rekapitulasi pengajuan calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke Kemendikbud. Yang mana, nantinya sekolah akan mendaftarkan calon peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sekolah yang berada dalam naungan Kemendikbud ini wajib memasukan data calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke dalam Dapodik.

Selanjutnya Kemendikbud akan mengirimkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada calon penerima yang lolos seleksi.

Kewajiban Peserta Didik Penerima Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para siswa/I penerima bantuan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini, yaitu sebagai berikut :

1. Menyimpan dan menjaga Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan baik.
2. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus dimanfaatkan/digunakan untuk keperluan yang relevan.
3. Terus belajar dan bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin, disiplin dan tekun.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan ini, dapat diperoleh hasil diskusi bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu program pemerintah di bidang Pendidikan yang sangat terasa dampak manfaatnya bagi masyarakat, khususnya para penerima bantuan program tersebut. Terkait Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari ini dapat dikatakan cukup baik, tetapi belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari responsivitas pihak sekolah terkait pengajuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa/I yang belum mendapatkan bantuan. Tetapi, dari hal tersebut ditemukan pula masalah terkait isi kebijakan bahwa masih banyaknya para penerima bantuan yang belum tepat sasaran. Dan kurangnya komunikasi dua arah antara koordinator program serta para penerima bantuan, sehingga informasi yang didapat oleh para penerima bantuan tersebut pun kurang jelas dan juga tepat sasaran. Serta terkait konteks kebijakan dapat dilihat dari masih adanya kebimbangan pihak sekolah, seperti pertimbangan ajuan bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh orang tua siswa kategori mampu tetap mereka dapatkan yang mana seharusnya mengetahui bahwa bijak dan adil dalam program ini sangat diperlukan.

Referensi

- Agustino Leo. 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2, Bandung: Alfabeta.
- Ali Faried. 2011. Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bela Ghia, Pebria Dheni. "Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkayang." Jurnal SEBATIK



- Bintarto, R. 1977. Pengantar Geografi Kota, Yogyakarta: Spring.
- Bungin Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya), Jakarta: Kencana
- Ega Aditya Alfa Riqi, Tri Yuniningsih. "Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang." Jurnal Undip
- Hardiyansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya), Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Mauliana Sari, Sri Musdalifah, Eka Anatami Asfar. "Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone." Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 03, no. 1 (2021)
- Natika, Luki & Rinjani, Sri Dewi. Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Subang). The World of Public Administration Journal Volume 3 issue 1, juni (2022)
- N. Eni Rohaeni, Oyon Saryono. "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan." Indonesia Journal of Education Management and Administration Review 02, no. 1 (2018)
- Syafiie Inu Kencana. 2007. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Subarsono Agustinus. 2016. Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer, Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Tahir Arifin. 2020. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bandung: Alfabeta
- Putri Pesi, Dasman Lanin. "Impelementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 11 Bancah Kecamatan Koto Parik Gadang Diatoh Kabupaten Solok Selatan." Journal of Public Administration Studies 01, no. 2 (2022)
- Wahab, S. A. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Wibawa, 1994. Kebijakan Publik: Proses dan Analisis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik dan Studi Kasus. Yogyakarta : In Caps. CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Winarno, B. 2014. Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).